



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis, 9 Juli 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Warung Remang Karaoke di Eks Tol HK Jabon Dibongkar



Razia di kafe eks tol HK Jabon Sidoarjo.

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Warung remang yang menyediakan karaoke dengan peman-lagu (LC) dan menjual minuman keras (miras) di kawasan eks Tol HK Jabon, Sidoarjo, dipastikan bakal ditutup hingga dibongkar. Keputusan itu diambil setelah rapat bersama Komisi A DPRD Sidoarjo.

Camat Jabon Abdul Rokhim mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama Komisi A DPRD Sidoarjo yang melibatkan berbagai unsur, mulai kepala desa, Forkopimka, MUI, NU, PAC, Fatayat hingga Ansor.

"Hasil rapat bersama Komisi A DPRD, kami mengundang kepala desa, Forkopimka, MUI, NU, PAC, Fatayat dan Ansor. Kesimpulannya, tempat karaoke harus ditutup

Menurutnya, keberadaan UMKM tetap menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat setempat. "Usaha UMKM seperti warung kopi, angkringan, dan penjual makanan tetap kami perhatikan karena menjadi mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Abdul Rokhim menjelaskan, penertiban yang dilakukan saat ini hanya menasar bangunan di kawasan eks Tol HK Jabon yang merupakan aset di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara kawasan menuju Telocor berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

"Yang di kawasan eks Tol HK masuk kewenangan PU. Sedangkan yang ke arah Telocor merupakan wilayah BBWS Brantas

Pelantikan Komisaris Delta Artha Tunggu OJK

SIDOARJO - Setelah Perumda Delta Tirta, Pemkab Sidoarjo juga mengumumkan komisaris dan direksi baru PT BPR Delta Artha Persero. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo Mochamad Bachruni Arsyawan terpilih sebagai komisaris dari unsur pe-

merintah. Pelantikan pejabat eselon II tersebut masih menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, selain Bachruni panitia seleksi (Pansel) juga menetapkan Indah Nara Cahyaningsih sebagai komisaris independen. Se-

mentara, posisi Direktur Operasional dan Bisnis dipercayakan kepada Sumarhadi Purwanto. Penetapan tersebut merupakan hasil akhir seleksi yang digelar pansel.

Fenny menjelaskan, hasil seleksi di tingkat daerah belum menjadi tahapan akhir. Sesuai ketentuan, ketiga calon pengurus ter-

sebut lebih dulu harus mengikuti proses penilaian di OJK sebelum ditetapkan secara definitif. "Sekarang masuk tahapan persetujuan OJK, setelah itu baru bisa diproses untuk penetapan," katanya kemarin (8/7). Secara umum, penilaian OJK terhadap calon komisaris dan direksi mencakup tiga aspek utama yakni

integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Dia menyebut, pihaknya akan segera menyampaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan kepada OJK agar proses evaluasi dapat segera berjalan. Durasi penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan regulator sehingga Pemkab belum dapat memastikan jadwal pelantikan. (ful/hen)

Biaya Haji 2027 Rp 107 Jutaan, CJH Cukup Bayar Rp 42 Jutaan

- Kemenhaj Usulkan Komposisi 60 Persen Subsidi, 40 Persen Ditanggung Jemaah
- Antrean Masih 5,7 Juta Orang
- Komnas Haji Ingatkan Potensi Bom Waktu

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp 107,3 juta per jemaah. Kendati naik dibanding tahun ini, biaya yang dibayar calon jemaah haji (CJH)

lebih murah. Sebab, Kemenhaj mengusulkan subsidi 60 persen. Usulan biaya haji 2027 itu disampaikan Menhaj Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat di Komisi VIII DPR pada Selasa (7/7) malam.



JELASKAN ANGGARAN: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kanan) memaparkan usulan biaya haji 2027 di Komisi VIII DPR, Selasa (7/7) malam.



Keterangan
- BPIH: biaya total penyelenggaraan haji
- Bipih: biaya yang ditanggung jemaah
- Nilai Manfaat: subsidi dari pengelolaan dana haji di BPKH

Pemberian atribut yang tidak edukatif juga dilarang."

Netti Lastiningsih
Plt Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo



MPLS Jadi Lima Hari, Murid TK Wajib Ikut

Dinas Dikbud Larang Perpeloncoan

SIDOARJO - Berbeda dibanding tahun sebelumnya, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 akan lebih panjang menjadi lima hari. Selain itu, jenjang TK yang sebelumnya tak wajib ikut, kini juga diharuskan mengikuti MPLS.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Netti Lastiningsih mengatakan, perubahan regulasi tersebut disesuaikan pada Permendiknas Nomor 12 Tahun 2026. "Kami sudah sosialisasikan aturan terbaru kepada kepala sekolah salah satunya penambahan durasi dari tiga menjadi lima hari," katanya.

Netti menjelaskan, selain penambahan durasi dan diperkuat dengan pemberian materi utama meliputi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, sopan hingga santun bermedia sosial. "Ini nanti bisa disesuaikan dengan tema apa yang mau diangkat sekolah," paparnya.

Selain larangan perpeloncoan, Netti menegaskan kegiatan MPLS tidak ada pungutan biaya. Pembayaran MPLS sepenuhnya bersumber dari dana BOS atau anggaran dinas. "Pemberian atribut yang tidak edukatif juga dilarang," katanya.

BUKA AKHIR PEKAN: Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo melayani pemohon SIMANTAP di GOR Delta.

Sepekan, 106 Pemohon Manfaatkan Layanan SIM Malam

SIDOARJO - Layanan SIMANTAP (Pelayanan SIM Malam Terpadu Satu Atap) telah berjalan sepekan. Hingga kini, ada 106 pemohon SIM yang memanfaatkan layanan tersebut. Sebagian besar merupakan buruh yang bekerja penuh waktu.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian



Mochamad Bachruni Arsyawan

**Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo**

Warung Remang Karaoke di Eks Tol HK Jabon Dibongkar



Razia di kafe eks tol HK Jabon Sidoarjo.

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Warung remang yang menyediakan karaoke dengan pemandu lagu (LC) dan menjual minuman keras (miras) di kawasan eks Tol HK Jabon, Sidoarjo, dipastikan bakal ditutup hingga dibongkar. Keputusan itu diambil setelah rapat bersama Komisi A DPRD Sidoarjo.

Camat Jabon Abdul Rokhim mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama Komisi A DPRD Sidoarjo yang melibatkan berbagai unsur, mulai kepala desa, Forkopimka, MUI, NU, PAC, Fatayat hingga Ansor.

"Hasil rapat bersama Komisi A DPRD, kami mengundang kepala desa, Forkopimka, MUI, NU, PAC, Fatayat dan Ansor. Kesimpulannya, tempat karaoke harus ditutup dan dibongkar," kata Abdul Rokhim, Rabu (8/7/2026).

Namun, Abdul Rokhim menegaskan, tidak seluruh bangunan di lokasi tersebut akan ditertibkan. Sebab, di kawasan itu juga terdapat usaha mikro seperti warung kopi, angkringan, dan penjual makanan yang menjadi sumber penghasilan warga.

"Kami melakukan klasifikasi. Yang ditutup dan dibongkar adalah tempat karaoke yang ada LC dan menjual minuman keras. Sementara warung kopi, angkringan, dan UMKM tetap diperbolehkan beroperasi," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan UMKM tetap menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat setempat. "Usaha UMKM seperti warung kopi, angkringan, dan penjual makanan tetap kami perhatikan karena menjadi mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Abdul Rokhim menjelaskan, penertiban yang dilakukan saat ini hanya menyasar bangunan di kawasan eks Tol HK Jabon yang merupakan aset di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara kawasan menuju Telocor berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

"Yang di kawasan eks Tol HK masuk kewenangan PU. Sedangkan yang ke arah Telocor merupakan wilayah BBWS Brantas, sehingga penanganannya menjadi kewenangan BBWS," jelasnya.

Ia juga mengakui razia sebelumnya diduga telah bocor sehingga jumlah pelanggaran yang terjaring tidak maksimal. "Kalau tidak bocor kemungkinan yang terjaring lebih banyak. Di lokasi itu ada sekitar 25 tempat. Kami sebenarnya sudah beberapa kali rapat Forkopimka, termasuk pada 9 Mei, dan berkoordinasi dengan Satpol PP. Namun karena informasi razia bocor, kondisinya menjadi seperti kemarin. Meski begitu, penertiban tetap harus dilaksanakan," tegasnya. (cat/rus)



M.SAIFUL ROHMAN/JAWA POS

KONSOLIDASI: Ketua DPC PKB Sidoarjo periode 2024-2026 Abdillah Nasih (tiga dari kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPC PKB Sidoarjo periode 2026-2031 Rizza Ali Faizin (tiga dari kanan) usai serah terima, Selasa (7/7) malam.

Pasang Target 18 Kursi pada Pemilu 2029

SIDOARJO – Pengurus DPC PKB Sidoarjo periode 2026 – 2031 resmi terbentuk. Usai berkonsolidasi, partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang itu membidik tambahan tiga kursi DPRD pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.

Target tersebut disampaikan usai serah terima pengurus lama ke pengurus baru di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Selasa (7/7) malam. PKB Sidoarjo dipimpin Rizza Ali Faizin dengan Ibnu Azzar Firdaus sebagai sekretaris dan Usman sebagai bendahara. Sementara, Ketua Dewan Syuro dijabat KH. Nur Cholis Misbah, Ketua Mustasyar KH. M. Atho'illah.

Rizza percaya diri jika partai yang ia pimpin mampu meningkatkan perolehan kursi DPRD dari 15 kursi menjadi 18 kursi pada Pileg 2029. Target tersebut akan ditempuh dengan dua strategi. Yakni mempertahankan basis suara yang sudah dimiliki dan memperluas dukungan dari pemilih baru. "Kami optimistis kursi di DPRD bisa naik," katanya.

Dia menyebut kepengurusan kali ini disusun dengan komposisi yang lebih beragam. Selain berasal dari unsur Nahdlatul Ulama, pengurus juga diisi tokoh lintas agama, kalangan profesional, pengusaha, hingga organisasi kepemudaan. Sekitar 35 persen pengurus berasal dari kalangan Gen Z dan milenial. (ful/hen)

Jawa Pos

Dinsos Sidoarjo Cairkan Bantuan Siswa Mahasiswa Kurang Mampu

Sidoarjo, Bhirawa

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mencairkan bantuan beasiswa kepada para mahasiswa kurang mampu dan siswa SMA kurang mampu di Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, M.Wildan SSi, mengatakan untuk mahasiswa kurang mampu ada sebanyak 500 orang dan siswa SMA kurang mampu juga sebanyak 500 orang penerima.

"Semoga bermanfaat bagi generasi muda di Kabupaten Sidoarjo yang karena keterbatasan biaya sedang menuntut ilmu, semoga pendidikan mereka lancar dan sukses sekolahnya," komentar Wildan, Rabu (8/7) kemarin.

Pencairan dana bantuan untuk mahasiswa dan anak SMA sudah dilakukan. Untuk siswa SMA kurang mampu, terpantau pada Selasa (7/7) kemarin, sudah mengantre di Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo, untuk mendapatkan buku tabungan dan ATM.

Seorang anak SMA, asal siswa SMAN 2 Sidoarjo, penerima bantuan ini, asal Desa Tengkulunan Kecamatan Candi, mengaku mengantre di urutan 400 an. Dirinya ditemani ibu, karena dirinya belum mempunyai KTP.[kus.kt]



alikus/Bhirawa

Petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melayani administrasi, siswa SMA kurang mampu yang akan mendapatkan buku tabungan dan ATIM di Bank Jatim Sidoarjo.



alikus/Bhirawa

Bambang Eko Suhartawan (tengah) pelatih kepala bola voli Sidoarjo ditengah atlet putra dan putri asal Sidoarjo.

Diperkuat Siswa SMANOR, Sidoarjo Juara Kejurprov Voli Pantai U17

Sidoarjo, Bhirawa

Tim Bola Voli pantai Kota Delta Sidoarjo, juara dalam Kejurprov Jatim U-17 yang telah digelar mulai 1 -7 Juli 2026 di Kota Sumenep Madura. Sebanyak 10 orang atlet yang dikirim, terdiri 6 orang putra dan 4 orang putri. Mereka berasal dari atlet di Smanor Sidoarjo dan atlet dari club. Kepala Pelatih Bola Voli pantai Sidoarjo, Bambang Eko Suhartawan, Rabu (8/7) kemarin mengatakan, dengan kemenenangan Tim bola voli pantai Sidoarjo ini, mereka pada 5- 9 Agustus mendatang, akan bertanding dalam Kejurnas U-17 yang akan digelar di Kota Palembang. "Pada tahun 2025 lalu, Sidoarjo menjadi juara umumnya. Pada tahun 2026 ini digelar di Kota Palembang, Tim dari Sidoarjo harus bisa mempertahankan predikat sebagai juara umum," kata Wawan, sapaan Bambang Eko Suhartawan , saat dihubungi.

Dalam Kejurprov Jatim di Kota Sumenep itu, tim bola voli pantai Sidoarjo, Tim putranya juara 1 dalam nomor 2x2. Demikian juga dengan tim putri juga menyabet juara 1 dan juara 3. Sedangkan pada nomor 4x4, Tim putra dan putri Sidoarjo, semuanya juga meraih juara 1. "Kalau anak-anak nanti pada Kejurnas U-17 di Kota Palembang juga juara, insya Allah aman, untuk bisa menjadi juara pada event Porprov Jatim X tahun 2027 nanti di Surabaya," komentar Wawan.

Ia berharap support dari Pengkab PBVSI Sidoarjo, agar para atlet bisa bertanding di Kota Palembang, dan bisa mempertahankan sebagai juara umum. [kus.wwn]

Aset Negara Disewakan untuk Tempat Karaoke

Inspektorat Bakal Periksa Kades Jemirahan

SIDOARJO - Penertiban puluhan warung remang-remang dan karaoke di kawasan eks Tol Utama Karya (HK) di Kecamatan Jabon yang digelar pekan lalu memunculkan fakta baru. Ada dugaan penyewaan lahan milik negara untuk operasional tempat maksiat. Inspektorat Sidoarjo menelusuri adanya setoran dari pemilik usaha pada oknum pemerintahan.

Dugaan penyalahgunaan aset dan pungli mencuat setelah pengakuan pemilik usaha saat razia Satpol PP Sidoarjo. Perempuan itu mengaku telah membayar uang sewa sebesar Rp 16 juta kepada Pemerintah Desa Jemirahan untuk masa sewa selama dua tahun.

Kepala Inspektur Pembantu (Irban) IV Inspektorat Sidoarjo Hariyanto mengatakan, pihaknya akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan untuk dimintai klarifikasi. Keterangan dari masing-masing pihak akan dicocokkan. "Kami akan panggil semua untuk klarifikasi," katanya kemarin (8/7).

Menurut Hariyanto, pemeriksaan tidak hanya menyangkut dugaan penarikan uang sewa. Status lahan yang ditempati warung, legalitas usaha, hingga kewenangan pihak yang melakukan penarikan uang juga akan ditelusuri. "Apabila ditemukan penyimpangan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan, persoalan akan diarahkan ke ranah pidana," kata Hariyanto.



TAK BERIZIN: Penertiban ratusan bangunan di kawasan eks Tol HK di Kecamatan Jabon menunggu rapat bersama pemerintah pusat.



Apabila ditemukan penyimpangan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan, persoalan akan diarahkan ke ranah pidana."

Hariyanto
Kepala Inspektur Pembantu IV Inspektorat Sidoarjo

meminta penjelasan. Langkah itu dilakukan setelah beredar bukti kuitansi yang diduga berkaitan dengan penyewaan lahan milik pe-

merintah pusat di kawasan eks Tol HK Jabon. "Kades sudah kami surati," katanya. Menurut dia, Pemerintah Kecamatan Jabon, lanjut

Rokhim, tidak akan melindungi siapa pun apabila terbukti melakukan pungutan liar atas pemanfaatan aset negara. "Kami tidak akan melindungi pihak mana pun apabila terbukti melakukan pungutan liar atas aset negara," tegasnya.

Hingga kemarin, Kades Jemirahan Khoirud Tholab belum memberikan tanggapan. Pesan WhatsApp belum dibalas. Panggilan yang masuk ke ponselnya juga tidak diangkat. (eza/ful/hen)

PENYALAHGUNAAN ASET NEGARA DI JABON

- Lahan merupakan bekas kawasan tol
 - Ada 400 bangunan semi permanen yang tak berizin
 - Sebagian besar untuk warung
 - Tempat usaha dikelola secara pribadi
- Sumber: Berbagai informasi

GRAFIS: HERLAMBAH JAWA POS

400 Bangunan di Eks Tol HK Segera Ditertibkan

PASCA razia pekan lalu, Pemkab Sidoarjo bakal mengambil langkah tegas terhadap bangunan liar di kawasan eks Tol HK.

rintah pusat. Dari informasi, 400 bangunan peruntukannya beragam. Ada yang dipakai untuk

pol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi mengatakan, rencana pembongkaran bangunan di sepanjang ka-

patkan," katanya. Menurut Novianto, razia di kawasan eks Tol HK sudah sering dilakukan. Dah-

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemberian atribut
yang tidak edukatif
juga dilarang.”

Netti Lastiningsih
Plt Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo



MPLS Jadi Lima Hari, Murid TK Wajib Ikut

Dinas Dikbud
Larang Perpeloncoan

SIDOARJO - Berbeda dibanding tahun sebelumnya, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 akan lebih panjang menjadi lima hari. Selain itu, jenjang TK yang sebelumnya tak wajib ikut, kini juga diharuskan menyelenggarakan MPLS.

Plt Kepala Dinas Pendi-

dikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Netti Lastiningsih mengatakan, perubahan regulasi tersebut disesuaikan pada Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026. "Kami sudah sosialisasikan aturan terbaru kepada kepala sekolah salah satunya penambahan durasi dari tiga menjadi lima hari," katanya.

Netti menjelaskan, selain penambahan durasi dan penyelenggara, MPLS juga diperkuat dengan pemberian

materi utama meliputi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, sopan hingga santun bermedia sosial. "Ini nanti bisa disesuaikan dengan tema apa yang mau diangkat sekolah," paparnya.

Selain larangan perpeloncoan, Netti menegaskan kegiatan MPLS tidak ada pungutan biaya. Pembiayaan MPLS sepenuhnya bersumber dari dana BOS atau anggaran dinas. "Pemberian atribut yang

tidak edukatif juga dilarang," katanya.

Netti mengungkapkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi mulai teguran tertulis hingga pemberhentian dari tugas sebagai panitia. Setelah kegiatan selesai, sekolah wajib melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada dinas. "Pelaksanaannya kami juga pantau langsung nantinya," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



AHMAD REZA/JAWA POS

BUKA AKHIR PEKAN: Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo melayani pemohon SIMANTAP di GOR Delta.

Sepekan, 106 Pemohon Manfaatkan Layanan SIM Malam

SIDOARJO – Layanan SIMANTAP (Pelayanan SIM Malam Terpadu Satu Atap) telah berjalan sepekan. Hingga kini, ada 106 pemohon SIM yang memanfaatkan layanan tersebut. Sebagian besar merupakan buruh yang bekerja penuh waktu.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing mengatakan, bahwa layanan SIM malam hanya buka setiap Sabtu dan Minggu. Pada hari pertama pelaksanaan yakni Sabtu (4/7), tercatat 54 pemohon datang ke lokasi pelayanan. Sedangkan Minggu (5/7), jumlah pemohon mencapai 52 orang. "Layanan didominasi buruh yang sif pagi, kemudian pekerja yang kantornya di luar kota dan kesulitan mengurus SIM pada jam kerja," ujarnya.

Layanan yang dipusatkan di GOR Delta Sidoarjo, Pintu B, beroperasi mulai 18.00 hingga 21.00. Christian mengatakan, ke depan pihaknya akan menempatkan pelayanan SIM malam hari ini ke sejumlah titik lain yang jauh dari Kota Sidoarjo. (eza/hen)

Jawa Pos

Biaya Haji 2027 Rp 107 Jutaan, CJH Cukup Bayar Rp 42 Jutaan

- Kemenhaj Usulkan Komposisi 60 Persen Subsidi, 40 Persen Ditanggung Jemaah
- Antrean Masih 5,7 Juta Orang, Komnas Haji Ingatkan Potensi Bom Waktu

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp 107,3 juta per jemaah. Kendati naik dibanding tahun ini, biaya yang dibayar calon jemaah haji (CJH)

lebih murah. Sebab, Kemenhaj mengusulkan subsidi 60 persen.

Usulan biaya haji 2027 itu disampaikan Menhaj Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat di Komisi VIII DPR pada Selasa (7/7) malam.

Baca Biaya... Hal 2



JELASKAN ANGGARAN: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kanan) memaparkan usulan biaya haji 2027 di Komisi VIII DPR, Selasa (7/7) malam.



Sumber: Kemenhaj, Kemenag, BPKH

Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

• 2027 : Rp 107 juta
• 2026 : Rp 88 juta
• 2025 : Rp 93 juta
• 2024 : Rp 105 juta
• 2023 : Rp 98 juta

Realisasi BPIH

• 2027 : (belum diputuskan)
• 2026 : Rp 87 juta
• 2025 : Rp 89 juta
• 2024 : Rp 93 juta
• 2023 : Rp 90 juta

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih/ beban jemaah)

• 2027 : Rp 42 juta (40 persen dari usulan BPIH)
• 2026 : Rp 54 juta
• 2025 : Rp 55 juta
• 2024 : Rp 56 juta
• 2023 : Rp 49 juta

Nilai manfaat/ subsidi biaya haji

• 2027 : Rp 64 juta (60 persen dari usulan BPIH)
• 2026 : Rp 33 juta (38 persen)
• 2025 : Rp 33 juta (38 persen)
• 2024 : Rp 37 juta (40 persen)
• 2023 : Rp 40 juta (44 persen)

Keterangan
• BPIH: biaya total penyelenggaraan haji
• Bipih: biaya yang ditanggung jemaah
• Nilai Manfaat: subsidi dari pengelolaan dana haji di BPKH

GRAFIS: HERLAMBAH/JAWA POS

Jawa Pos

Biaya Haji 2027 Rp 107 Jutaan, CJH Cukup Bayar Rp 42 Jutaan

Sambungan dari Hal 1

Dia mengakui, usulan BPIH 2027 sebesar Rp 107,3 juta per jemaah tersebut naik Rp 19,9 juta dibandingkan tahun ini. Meski demikian, beban atau biaya yang jadi tanggungan jemaah lebih kecil.

"Untuk menjaga BPIH tetap terjangkau, nilai manfaat (subsidi biaya haji, Red) kami usulkan 60 persen," katanya. Nilai manfaat itu bersumber dari hasil investasi dana haji yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Irfan mengatakan, porsi Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) yang menjadi beban jemaah adalah 40 persen atau sekitar Rp 42 jutaan. Biaya ini lebih rendah dibandingkan Bipih tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 54 jutaan per orang. Jika Bipih 2027 disetujui DPR, CJH yang berangkat tahun depan hanya perlu membayar Rp 17 jutaan per orang. Sebab, saat mendaftar haji, mereka sudah menyetor Rp 25 juta.

Irfan menegaskan bahwa

proporsi 60:40 itu bertujuan meringankan beban jemaah. "Di tengah tantangan ekonomi global seperti sekarang," tandasnya. Meski begitu, Irfan menegaskan bahwa komposisi tersebut masih usulan. Pada prinsipnya, pemerintah ingin biaya haji yang ditanggung jemaah tahun depan lebih murah atau maksimal sama seperti periode 2026.

Dia menyebutkan, BPIH 2027 naik drastis dengan mempertimbangkan banyak faktor. Antara lain, antisipasi penguatan dolar, kenaikan harga avtur, serta beban pajak oleh pemerintah Saudi. Selain itu, ada potensi biaya tambahan akibat peningkatan layanan di masa Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Pernah Terjadi pada 2022

Dalam kesempatan terpisah, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan keterangan mengenai rencana haji 2027 di Asrama Haji Jakarta kemarin (8/7).



UNIKAP DATA: Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan keterangan mengenai rencana haji 2027 di Asrama Haji Jakarta kemarin (8/7).

CJH tahun depan.

Dahnil menjelaskan, pada haji 2026 yang baru selesai, jemaah dibebani biaya haji sebesar 61 persen. Sedangkan subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji 39 persen. "Tahun ini kami balik. Yang dibayarkan jemaah 40 persen, nilai manfaat 60 persen," kata Dahnil. Kemudian, pada 2021 Indonesia kembali tidak mengirim jemaah haji akibat pandemi Covid-19. Sehingga pada tahun tersebut ada saving kembali Rp 18 triliun.

Lalu, pada musim haji 2022, Indonesia hanya mengirim jemaah haji 60 per-

sen dari kuota normal. Sehingga ada saving dana lagi oleh BPKH. Dahnil mengatakan, pada musim haji 2022 lalu, nilai manfaat atau subsidi biaya haji mencapai 59 persen. Dengan porsi yang besar itu, haji 2022 bisa diselenggarakan sampai selesai. "Jadi komposisi itu (60 persen subsidi dan 40 persen beban jemaah, Red) sangat memungkinkan," tandasnya.

Dahnil juga mengatakan, Saudi sudah menetapkan timeline haji 2027. Di antaranya adalah kewajiban dari seluruh negara pengirim jemaah haji untuk setor uang muka di e-wallet yang sudah ditetapkan Saudi. Batas akhir pembayaran uang muka adalah 15 Juli depan.

Dahnil menyebutkan, uang muka yang harus disetor sebesar 828 juta riyal atau sekitar Rp 4 triliun. "(Uang muka) itu mandatory. Jadi

sen dari kuota normal. Sehingga ada saving dana lagi oleh BPKH. Dahnil mengatakan, pada musim haji 2022 lalu, nilai manfaat atau subsidi biaya haji mencapai 59 persen. Dengan porsi yang besar itu, haji 2022 bisa diselenggarakan sampai selesai. "Jadi komposisi itu (60 persen subsidi dan 40 persen beban jemaah, Red) sangat memungkinkan," tandasnya.

Dahnil juga mengatakan, Saudi sudah menetapkan timeline haji 2027. Di antaranya adalah kewajiban dari seluruh negara pengirim jemaah haji untuk setor uang muka di e-wallet yang sudah ditetapkan Saudi. Batas akhir pembayaran uang muka adalah 15 Juli depan.

Dahnil menyebutkan, uang muka yang harus disetor sebesar 828 juta riyal atau sekitar Rp 4 triliun. "(Uang muka) itu mandatory. Jadi

kalau nanti pesan layanan haji, dipotong dari situ," tuturnya. Dia mengatakan sudah meminta persetujuan DPR supaya dana haji di BPKH segera ditransfer ke Kemenhaj untuk pembayaran uang muka tadi.

Kenaikan BPIH Tidak Bisa Dihindari

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan, kenaikan BPIH memang tidak bisa dihindari. "Karena situasi belakangan ini kan ekonomi global juga masih bergerak dalam ketidakpastian dan ada banyak gejolak," tuturnya. Terutama didorong oleh situasi geopolitik di Timur Tengah, perang antara Iran dengan Amerika-Israel.

Mustolih lantas mengomentari proporsi subsidi biaya haji dari nilai manfaat yang mencapai 60 persen. "Ini seolah-olah baik di

jangka pendek, kelihatannya biayanya murah. Tetapi ini akan menjadi bom waktu," tutur dia. Menurut Mustolih, beban subsidi yang terlalu besar bisa menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah yang masih antre. Dia mengingatkan bahwa saat ini ada sekitar 5,7 juta CJH yang antre. Jika setiap tahun hasil investasi dana haji tersedot untuk subsidi, jemaah yang antre akan mendapatkan subsidi dengan nilai kecil.

Dia mengingatkan, porsi subsidi biaya haji harus mempertimbangkan potensi kuota tambahan. "Misalnya dapat tambahan kuota 20 ribu kursi, itu pasti akan jebol," katanya. Dia menekankan, subsidi biaya haji harus diambil dari hasil investasi. Tidak boleh dari uang pokok dana haji yang bersumber dari setoran awal pendaftaran CJH. (wan/oni)

PBNU Sepakat Mukhtamar Digelar di Pesantren Tambakberas Jombang

Sambungan dari Hal 1

gunakan berupa fasilitas akan datang, yang dibutuhkan...

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pelantikan Komisaris Delta Artha Tunggu OJK

SIDOARJO – Setelah Perumda Delta Tirta, Pemkab Sidoarjo juga mengumumkan komisaris dan direksi baru PT BPR Delta Artha Perseroda. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo Mochamad Bachruni Aryawan terpilih sebagai komisaris dari unsur pe-

merintah. Pelantikan pejabat eselon II tersebut masih menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, selain Bachruni panitia seleksi (Pansel) juga menetapkan Indah Nara Cahyaningsih sebagai komisaris independen. Se-

mentara, posisi Direktur Operasional dan Bisnis dipercayakan kepada Sumarhadi Purwanto. Penetapan tersebut merupakan hasil akhir seleksi yang digelar pansel. Fenny menjelaskan, hasil seleksi di tingkat daerah belum menjadi tahapan akhir. Sesuai ketentuan, ketiga calon pengurus ter-

sebut lebih dulu harus mengikuti proses penilaian di OJK sebelum ditetapkan secara definitif. "Sekarang masuk tahapan persetujuan OJK, setelah itu baru bisa diproses untuk penetapan," katanya kemarin (8/7). Secara umum, penilaian OJK terhadap calon komisaris dan direksi mencakup tiga aspek utama yakni

integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Dia menyebut, pihaknya akan segera menyampaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan kepada OJK agar proses evaluasi dapat segera berjalan. Durasi penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan regulator sehingga Pemkab belum dapat memastikan jadwal pelantikan. (fal/hen)



Mochamad Bachruni Aryawan

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

400 Bangunan di Eks Tol HK Segera Ditertibkan

PASCA razia pekan lalu, Pemkab Sidoarjo bakal mengambil langkah tegas terhadap bangunan liar di eks Tol HK Jabon. Ada 400 bangunan yang akan ditertibkan. Pembongkaran masih menunggu rapat bersama peme-

rintah pusat.

Dari informasi, 400 bangunan peruntukannya beragam. Ada yang dipakai untuk warung. Ada pula yang disalahgunakan untuk prostitusi berkedok warung dan tempat karaoke.

Kabid Tibumtranmas Sat-

pol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi mengatakan, rencana pembongkaran bangunan di sepanjang kawasan eks Tol HK Jabon masih menunggu hasil rapat bersama. "Jadwal pelaksanaannya masih belum ditentukan. Masih akan dira-

patkan," katanya.

Menurut Novianto, razia di kawasan eks Tol HK sudah sering dilakukan. Pekan lalu, ada puluhan pemandu lagu yang diamankan. Petugas juga menyita minuman keras yang dijual secara ilegal. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Air PDAM Perum Sentra Alam Candi Sidoarjo Mati Sehari-hari

Warga Keluhkan Tak Bisa Mandi

Sidoarjo, Memorandum

Kemarau baru berjalan, namun warga Perum Sentra Alam, Desa Wedoroklurak, Kecamatan Candi, sudah dibuat keliptungan. Pasokan air bersih dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo mendadak berhenti mengalir sepanjang Selasa (7/7), membuat aktivitas sehari-hari warga lumpuh.

Kondisi ini memicu keluhan lantaran air bersih menjadi kebutuhan utama, terutama saat musim kemarau ketika sebagian besar warga mengandalkan layanan PDAM.

Sabrina (43) dan Aisyah (47), warga setempat, mengaku terkejut karena sebelumnya aliran air berjalan normal. Namun sejak pagi hari, air

mendadak tidak mengalir tanpa ada pemberitahuan dari pihak Perumda Delta Tirta.

"Sekarang musim kemarau dan hampir semua warga di sini mengandalkan air dari Perumda Delta Tirta Unit Cabang Candi. Biasanya lancar, tapi kok tiba-tiba mati," keluh keduanya.

Aisyah mengatakan ketiadaan informasi dari pihak PDAM membuat warga tidak memiliki persiapan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

"Kalau sebelumnya ada pemberitahuan, kami tentu bisa memaklumi dan menyiapkan cadangan air. Tapi ini sejak pagi air tidak mengalir. Mau mandi saja bingung, padahal kami juga selalu membayar tagihan tepat waktu," ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, tim lapangan Perumda Delta Tirta Unit Cabang Candi, Agus, menjelaskan bahwa penghentian sementara pasokan air disebabkan adanya pekerjaan perbaikan jaringan pipa di kawasan barat

Jalan Raya Lingkar Timur.

"Ada perbaikan saluran di barat jalan. Pekerjaannya sudah hampir selesai, saat ini masih proses normalisasi," jelas Agus melalui pesan WhatsApp.

Warga berharap proses perbaikan dapat segera dituntaskan sehingga distribusi air bersih kembali normal. Mereka juga meminta Perumda Delta Tirta meningkatkan pelayanan dengan memberikan informasi lebih awal kepada pelanggan setiap kali terjadi gangguan distribusi agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. (hum/jok/fer)



Perum Sentra Alam, Desa Wedoroklurak, Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Polsek Krian Berhasil Temukan Orang Tua Anak Hilang

Respons Cepat Hotline 110

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



DUKUNG PROGRAM MBG: Bupati Sidoarjo Subandi gelar rapat koordinasi dengan berbagai elemen.

Dukung Penuh MBG, Pemkab Integrasikan Kawasan Mandiri Pangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan langkah strategis untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengintegrasikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan.

Diky Putra Sensirli, Wartawan Radar Sidoarjo

SKEMA tersebut disiapkan agar kebutuhan bahan pangan program MBG dapat dipenuhi dari potensi lokal sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (7/7). Rakor juga membahas penguatan stabilitas daerah dan dukungan terhadap program strategis nasional.

Menurut Subandi, Pemkab Sidoarjo memberikan dukungan penuh terhadap visi dan misi Presiden RI, khususnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

"Program Makan Bergizi Gratis sangat penting untuk membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, kami akan mengintegrasikan Kawasan Mandiri Pangan di desa dan kelurahan sebagai ekosistem pendukung MBG agar mampu menyuplai bahan pangan lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Subandi.

Ia menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan MBG membutuhkan sinergi yang kuat antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

● Ke Halaman 10



FENOMENA

 **RADAR**
SIDOARJO.ID

Sambungan

Dukung Penuh MBG...

Selain itu, pengawasan bersama juga harus diperkuat agar kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran program tetap terjaga. Keberhasilan program ini harus ditopang dengan sinergi yang kuat dan pengawasan bersama agar kualitas, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran-nya benar-benar terjamin," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga mengarahkan program ketahanan pangan daerah agar lebih terfokus pada pemenuhan tiga kebutuhan pokok masyarakat, yakni beras, gula, dan minyak goreng.

"Kita harus fokus pada tiga kebutuhan dasar masyarakat, yaitu beras, gula, dan minyak. Kehadiran program ketahanan pangan ini harus mampu meringankan beban ekonomi masya-

rakat," katanya.

Selain membahas ketahanan pangan, rakor juga menitikberatkan pentingnya menjaga stabilitas daerah melalui tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif.

Menurut Subandi, urusan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban, memperkuat ketahanan sosial, dan memba-

ngun keharmonisan masyarakat.

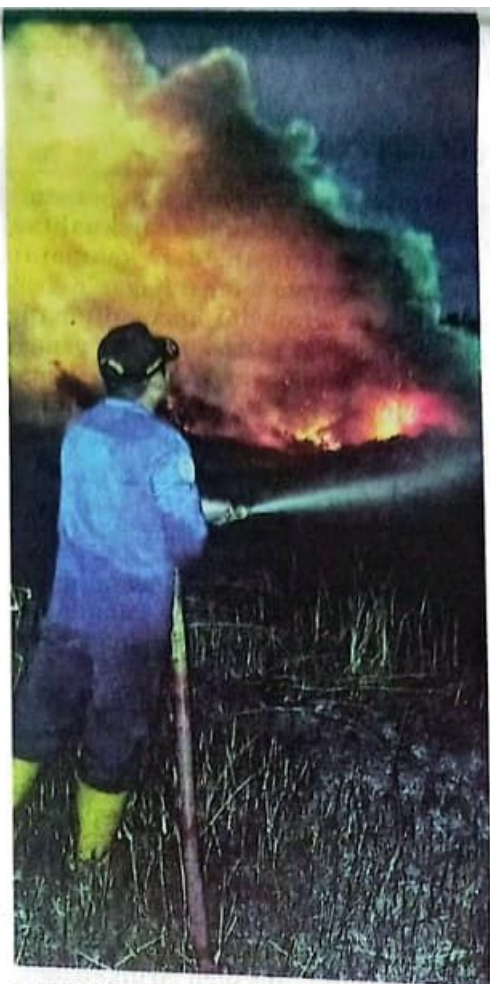
"Sidoarjo memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas Jawa Timur. Karena itu, kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif bersama Forkopimda, tokoh agama, hingga seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen, mulai dari Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dunia usaha, hingga tokoh ma-

sarakat, untuk memperkuat sinergi demi mewujudkan Sidoarjo yang aman, sehat, maju, dan berdaya saing.

"Saya mengajak Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah. Kita pastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa," pungkasnya. (dik/vga)

 **RADAR**
SIDOARJO.ID



LUDES: Personel Damkar Sidoarjo berusaha memadamkan api di lahan di kawasan Waru, Sidoarjo.

Lahan Kosong Seluas Dua Hektare di Waru Terbakar

WARU-Kebakaran melanda lahan kosong yang dipenuhi ilalang di Jalan H. Anwar Hamzah, Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Selasa (7/7) petang. Api membakar area sekitar 20.000 meter persegi atau sekitar dua hektare sebelum berhasil dipadamkan oleh petugas BPBD Damkar Sidoarjo.

Humas BPBD Damkar Sidoarjo, Yoli Wisnu, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 18.40 WIB, sekitar 10 menit setelah api pertama kali diketahui muncul. Satu unit mobil pemadam dari Pos Waru langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan.

"Begitu menerima laporan, petugas kami segera bergerak menuju lokasi. Berkat respons cepat tim di lapangan, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merambat ke bangunan maupun permukiman di sekitar lokasi," ujar Yoli Wisnu.

● Ke Halaman 10

Lahan Kosong...

Proses pemadaman berlangsung hingga pukul 20.45 WIB. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 20.000 meter persegi dengan objek yang terbakar berupa ilalang dan semak kering. Penyebab kebakaran hingga kini

masih dalam penyelidikan.

Yoli memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kerugian material juga diperkirakan nihil karena lahan yang terbakar merupakan lahan kosong milik kawasan Perum Pondok Chandra Indah.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, terutama saat cuaca panas dan kondisi vegetasi mengering. Hal tersebut sangat berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas," pungkash Yoli Wisnu. (sur/vga)



MEMUDAHKAN: Warga memanfaatkan layanan SIM pada malam hari di GOR Sidoarjo.

Layanan SIM Malam Polresta Permudah Warga Urus Perpanjangan SIM

KOTA-Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada malam hari melalui program SIM Malam Pelayanan Terpadu Satu Atap (SIMANTAP). Layanan ini dibuka di pintu masuk B GOR Sidoarjo setiap pukul 18.00 hingga 21.00 WIB sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pekerja yang kesulitan mengurus SIM pada jam kerja.

Selain melayani perpanjangan SIM, SIMANTAP juga menyediakan layanan kesehatan dan tes psikologi di lokasi yang sama. Dengan konsep pelayanan terpadu, masyarakat tidak perlu berpindah tempat untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi perpanjangan SIM.

Kapolresta Sidoarjo, Christian Tobing, mengatakan kehadiran SIMANTAP merupakan bagian dari komitmen Polresta Sidoarjo untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan pu-

blik. Momentum Hari Bhayangkara ke-80 dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah dijangkau, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Melalui inovasi SIMANTAP ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan kemudahan dalam menentukan waktu pengurusan SIM. Ke depan, layanan ini juga akan kami hadirkan di berbagai wilayah maupun pusat keramaian, termasuk pada akhir pekan. Harapannya masyarakat dapat memperpanjang SIM tanpa harus mengganggu aktivitas pekerjaan mereka," ujar Christian Tobing saat meninjau pelayanan SIMANTAP, Selasa (7/7).

Program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya disampaikan Abdul Faruq, warga Sidokare, yang mengaku selama ini kesulitan memperpanjang SIM

● Ke Halaman 10

Layanan SIM Malam...

karena bekerja di Surabaya sehingga tidak memiliki waktu mengurusnya pada jam pelayanan reguler.

"Saya berangkat kerja pagi dan pulang sore, sehingga hampir tidak pernah sempat mengurus SIM pada hari kerja. Dengan adanya layanan

sudah sesuai ketentuan, kami memberikan sanksi tambahan berupa ke-

pungkasnya. (dik/vga)

SIM malam dari Polresta Sidoarjo ini saya sangat terbantu. Sepulang kerja saya bisa langsung memperpanjang SIM tanpa harus mengambil cuti," kata Faruq.

Melalui SIMANTAP, Polresta Sidoarjo berharap pelayanan publik semakin mudah diakses seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendorong meningkatnya kesadaran warga untuk memperpanjang SIM tepat waktu. (sur/vga)

Bachruni Terpilih Jadi Calon Komisaris BPR Delta Artha

KOTA-Proses panjang seleksi calon Komisaris dan Direksi PT BPR Delta Artha Perseroda akhirnya mencapai babak akhir. Bupati Sidoarjo Subandi resmi mengumumkan tiga nama yang dinyatakan lolos hasil wawancara akhir dan akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti tahapan berikutnya, termasuk uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku.



Bachruni Aryawan

Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Pengumuman Bupati Sidoarjo Nomor 900.1.13.2/3356/438.1.2.1/2026 tentang Calon Anggota Komisaris Terpilih dan Calon Anggota Direksi Terpilih Hasil Wawancara Akhir Seleksi Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi PT BPR Delta Artha Perseroda Tahun 2026.

Tiga nama yang dinyatakan lolos yakni Ir. Mochamad Bachruni Aryawan, MM sebagai calon Komisaris dari unsur Pemerintah Daerah, Indah Nara Cahyaningsih, S.E. sebagai calon Komisaris Independen, serta Sumarhadi Purwanto, S.E. sebagai calon Direktur Operasional dan Bisnis.

Bachruni menjadi sosok yang mendapat kepercayaan mewakili Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan pertimbangan strategis di PT BPR Delta Artha Perseroda. Penunjukan tersebut dinilai penting mengingat Pemkab Sidoarjo merupakan pemegang sekitar 95 persen saham perusahaan daerah tersebut.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan. Para peserta telah melalui proses yang cukup panjang mulai dari seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), hingga wawancara akhir.

"Kami memastikan seluruh proses seleksi berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. Mereka yang terpilih merupakan peserta terbaik berdasarkan hasil seluruh tahapan seleksi yang telah dilaksanakan," ujar Subandi, Rabu (8/7). (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIM Malam Mudahkan Pekerja Tanpa Cuti

SIDOARJO, SURYA – Layanan SIM malam langsung disambut antusias warga. Program ini menjadi solusi bagi pekerja yang selama ini kesulitan mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) karena terbururn jam kerja.

Pelayanan pada malam hari memberi ruang bagi masyarakat untuk mengurus SIM tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan. Warga pun mengaku tak lagi harus mengambil cuti atau meninggalkan pekerjaan demi memperpanjang masa berlaku SIM.

Kehadiran layanan pengurusan SIM malam yang digelar Polresta Sidoarjo mendapat respons positif dari masyarakat. Inovasi tersebut dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan warga yang tidak sempat datang ke layanan SIM pada siang hari.

Abdul Faruq, warga Sidoarjo,

re, Sidoarjo, mengaku sangat terbantu dengan layanan tersebut. Sebagai pekerja yang setiap hari bermobilisasi ke Surabaya, ia selama ini kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena terbururn jam kerja.

"Saya berangkat kerja pagi dan pulang sore, jadi hampir tidak pernah sempat mengurus SIM di hari kerja biasa. Adanya layanan SIM malam ini, saya bisa langsung datang setelah pulang kerja tanpa harus mengambil cuti," ujar Faruq.

Hal senada disampaikan Heri, ia sengaja memanfaatkan layanan SIM malam karena tidak memiliki waktu luang pada siang hari. "Awalnya lihat dari media, kemudian cari informasi tentang layanan SIM malam. Saya sengaja ngurus malam hari karena saat siang tidak bisa," katanya.

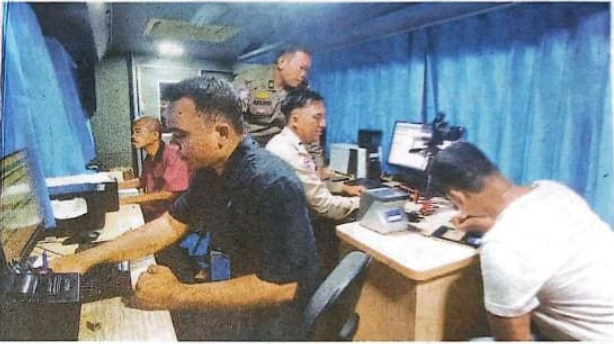
Kemudahan itu dihadirkan

melalui program SIM Malam Pelayanan Terpadu Satu Atap (SIMANTAP). Layanan dibuka setiap malam pukul 18.00-21.00 WIB di pintu masuk B Gedung Olahraga (GOR) Sidoarjo.

Untuk mempercepat proses pelayanan, gerai tersebut juga menyediakan pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi dalam satu lokasi sehingga pemohon tidak perlu berpindah tempat.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, mengatakan inovasi SIMANTAP dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik dengan aktivitas masyarakat. Bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80, kepolisian ingin menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel.

"Melalui inovasi ini, kami ingin hadir lebih dekat di te-



SIM MALAM – Warga memanfaatkan layanan SIM Malam Pelayanan Terpadu Satu Atap (SIMANTAP) yang digelar Satlantas Polresta Sidoarjo di kawasan GOR Sidoarjo. Layanan pada malam hari ini memudahkan pekerja mengurus SIM tanpa mengganggu aktivitas kerja.

ngah masyarakat dan memberikan keleluasaan bagi warga dalam menentukan waktu pengurusan SIM mereka. Harapannya, aktivitas produktif warga sehari-hari

sama sekali tidak terganggu," kata Christian saat meninjau operasional layanan tersebut.

Ke depan, Polresta Sidoarjo berencana memperluas jangkauan SIMANTAP. La-

yanan tidak hanya tersedia di pusat kota, tetapi juga akan menyasar kecamatan, pusat keramaian, hingga beroperasi pada akhir pekan.

Langkah tersebut diharapkan

kan semakin memudahkan masyarakat mengakses pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan berkendara melalui layanan yang lebih inklusif. (uif)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Camat Gedangan Sidoarjo Buka Layanan Selamat Datang, Bisa Unsur KTP dan KK Malam Hari



KITH, SIDOARJO – Para petinggi kartasasi maupun petak tidak perlu khawatir lagi, bisa membuka wali mengikuti dokumen diperpendukasi karena akan betapa pada pagi dan siang hari, sekarang tidak perlu khawatir. Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, membuka layanan malam hari, termasuk, Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Menurut Camat Gedangan Kecamatan Gedangan, layanan malam hari ini merupakan hasil dari inovasi layanan yang masyarakat desa di seluruh Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. “Saya berharap 15 desa untuk mengikuti layanan malam hari (Malam) Kecamatan Gedangan. Untuk masyarakat desa tersebut ada kemudahan layanan bagi warga yang akan betapa pagi, siang, hingga malam hari,” kata Camat Gedangan. Layanan Sekretariat Daerah ini dimulai pada 4 Mei 2024. Buka dari pukul 18.00 hingga 21.00. Pelayanan tersebut dilakukan setiap jam kerja normal di Kantor Kecamatan Gedangan, yaitu pukul 08.00 hingga pukul 16.00. Hari kerjanya pun sama, yaitu Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu, serta Libur Nasional dan Hari Besar. Apa saja layanan malam Sekretariat Daerah? Camat Gedangan menjelaskan layanan administrasi diperpendukasi. Di antaranya, penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk warga Negeri Indonesia (PNI). Penerbitan maupun perbaikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EK), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Identitas Penduduk Digital (KID), dan juga layanan layanan administrasi umum lainnya.



Sebagai layanan yang diberikan Kantor Kecamatan Gedangan untuk pengantian Sekretariat Daerah (PDI).

Kartasasi diperpendukasi, sebagai Kantor Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, tidak ingin warga-beli-beli saat mengurus dokumen diperpendukasi. Karena itu, dibuka layanan hotline malam hari, yaitu 08127031165. “Selain betanya-tanya saja. Sifatnya apa, berapa lama petanya. Ada daya atau jatah. Hingga dipaparkan oleh supra tidak bisa-bisa,” kata Camat Gedangan. Yang harus Camat Gedangan, Sidoarjo, ini, Nomor 101 tidak bisa dipaparkan untuk semua warga Gedangan untuk betanya-tanya saat layanan. Nomor itu juga dapat dipakai sebagai nomor panggilan bagi warga. Betah betanya apa saja yang diperpendukasi maupun pelayanan diperpendukasi di Kabupaten Sidoarjo. “Yang harus Kecamatan Kecamatan akan ditangani Kecamatan Gedangan. Yang masuk Kecamatan Kabupaten atau yang lain akan kami komunikasikan” kata Camat Gedangan. Layanan Malam Sekretariat Daerah ini mendapatkan respon positif dari warga Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Mereka tidak ingin-nanti datang ke Kantor Kecamatan untuk mengurus betanya keperluan administrasi diperpendukasi. “Harus Pak Camat. Itu sangat bermanfaat bagi kami, para petanya,” kata Sutris, petanya salah satu petak di Gedangan. “Apabila gend (KTP) Sifatnya apa saja” kata petanya yang mengurus KTP-kuda. Dia pun mendapatkan penjelasan bahwa pengantian KTP petanya diberikan kartu keluarga dan KTP petanya yang sudah rusak. “Petanya ini nomor, Pak Camat” kata petanya, warga Gedangan yang hendak mengurus KTP. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Dorong Penyelesaian Sertifikat dan Lahan Makam Warga Kapling Balonggabus, Dugan Waprasatai Pengembang Jadi Sorotan



Sidoarjo – [Hawa PATROLLO.COM](#) – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk mencari solusi atas belum tuntasnya penyelesaian sertifikat tanah dan penyediaan lahan makam bagi warga Kapling Balonggabus, Rawa (16/7/2024). Forum tersebut menjadi upaya mempertemukan seluruh pihak terkait guna memperoleh kejelasan hukum sekaligus memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi setelah persoalan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Hearing dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Rizza Ali Faldin, serta dihadiri perwakilan warga Kapling Balonggabus, Kepala Desa Balonggabus Kidul, Kepala Desa Klatenari H. Chusnul, perwakilan PT INH, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPNPTSP), serta sejumlah organisasi perantara daerah (OPD) terkait. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa PT INH, yang diketahui telah diakuisisi (take over) oleh PT Tri Hasandha Sukses, diduga belum memenuhi kewajibannya kepada para pembiil kapling. Penyelesaian yang mengemuka tidak hanya menyangkut belum diterbitkannya sertifikat hak milik bagi para pembiil, tetapi juga belum tersedianya lahan makam yang sejak awal dijanjikan sebagai bagian dari fasilitas kawasan. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Rizza Ali Faldin mengatakan bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam hearing menunjukkan masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat belum dipenuhinya kewajiban pengembang. Menurutnya, negara melalui pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pembiil. “Yang menjadi perhatian kami bukan hanya persoalan sertifikat tanah, tetapi juga penyediaan lahan makam yang merupakan hak warga. Pemerintah harus hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan ini sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya benar-benar terpenuhi,” ujarnya. Pihak yang akrab disapa Kaji Raza itu meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPN serta pihak perusahaan agar duduk bersama menyelesaikan seluruh hambatan administratif maupun legalitas perusahaan agar proses penerbitan sertifikat induk dapat segera dilakukan dan selanjutnya dipecah menjadi sertifikat atas nama masing-masing warga. Ia juga mengemukakan langkah Pemerintah Desa Balonggabus dan Pemerintah Desa Klatenari yang selama ini terus berupaya memediasi komunikasi antara warga dengan pihak perusahaan. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah desa yang terus melakukan mediasi. Harapan kami persoalan ini dapat segera diselesaikan sehingga seluruh hak warga dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Sementara itu, perwakilan warga Kapling Balonggabus, Achmad Soleh, mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya telah menepuh jalur hukum dan memenangkan gugatan yang memungkinkan perusahaan melikasakan seluruh kewajibannya kepada para pembiil. Namun hingga kini, putusan tersebut dibuat belum dipatuhi sehingga belum ada satu pun warga yang menerima sertifikat tanah. “Kami sudah mengajukan gugatan dan putusannya perusahaan diwajibkan memenuhi kewajibannya. Tetapi sampai hari ini putusan tersebut belum dilaksanakan. Bahkan belum ada satu pun warga yang menerima sertifikat,” ungkap Achmad Soleh. Ia berharap hearing yang diinisiasi DPRD Kabupaten Sidoarjo menjadi momentum penting untuk mengaktifkan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, tuntutan warga sangat sederhana, yakni memperoleh hak atas tanah yang telah dibeli secara sah. “Harapan kami

senderhana. Kami sudah membeli kapling sehingga seharusnya memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Kami berharap hearing ini benar-benar menghasilkan solusi nyata sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum,” katanya. Selain persoalan sertifikat, Achmad Soleh juga menyoroti belum tersedianya lahan makam seluas-luasnya yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa sejak kawasan tersebut dihidupi telah ada warga yang meninggal dunia, namun tidak dapat dimakamkan di lokasi yang dijanjikan karena lahan makam hingga kini belum terada. “Kami juga berharap ada penyelesaian terkait lahan makam. Sudah ada warga yang meninggal dunia, tetapi tidak dapat dimakamkan di lokasi yang dijanjikan karena lahannya belum terada. Harus-mustahak setelah hearing ini persoalan tersebut segera menemukan jalan keluar,” tuturnya. Dalam hearing tersebut juga mencuat dugaan adanya oknum yang mengatasnamakan perwakilan PT INH menawarkan jasa pengurusan sertifikat secara perorangan dengan biaya sekitar Rp 30 juta, ditambah pembayaran harganaya Pagar Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar Rp4 juta. Menurut Achmad Soleh, sejumlah warga bahkan telah melakukan pembayaran karena dijanjikan sertifikat dapat selesai hanya dalam waktu satu minggu. Padahal berdasarkan penjelasan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, proses penerbitan sertifikat pada kasus tersebut tidak dapat dilakukan secara perorangan. “BPN sudah menjelaskan bahwa pengurusan sertifikat tidak bisa dilakukan secara perorangan. Karena itu kami meminta pihak seperti ini dihentikan agar tidak semakin merugikan warga. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban justru kembali mengalami kerugian,” tegasnya. Menanggapi persoalan tersebut, perwakilan BPN Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa kendala utama berada pada aspek legalitas perusahaan. Saat ini Desa Perdesihan Hal atau Tanah dan Bangunan (BPTHG) atau transaksi pembelian lahan masih terdapat atas nama perusahaan sehingga hanya pihak perusahaan yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat induk. Setelah sertifikat induk diterbitkan, proses selanjutnya baru dapat dilakukan pemecahan menjadi sertifikat atas nama masing-masing pembiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPNPTSP) Kabupaten Sidoarjo, Rizka Purnama, menjelaskan bahwa PT INH memang pernah memiliki perizinan untuk lokasi di Desa Kendal Picabean. Namun terkait kegiatan penjualan kapling di lokasi yang saat ini menjadi objek pengaduan masyarakat, DPNPTSP menyatakan belum pernah memediasi maupun menertibkan izin sebagaimana dipaparkan. “Penyelesaian masalah pernah memiliki izin di Desa Kendal Picabean. Namun untuk lokasi yang saat ini dipersoalkan warga, dari sisi teknis DPNPTSP belum pernah ada perizinannya. Setiap pengembangan kawasan wajib mengacu pada peta tata ruang dan memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Rizka. Ia menambahkan, masalahnya pengembangan kawasan kapling di Kabupaten Sidoarjo harus menjadi perhatian semua seluruh perangkat daerah agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari. Menurutnya, setiap pengembangan wajib memenuhi seluruh ketentuan tata ruang, termasuk penyediaan poskam, kamar, dan utilitas umum (PSU), sebelum melakukan pemasaran kepada masyarakat. “Fenomena pengembangan kapling yang saat ini cukup marak harus menjadi perhatian bersama. Semua kegiatan harus sesuai tata ruang serta memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas umum. DPRD sebagai garba terapan harus memperkuat pengawasan agar persoalan seperti ini tidak kembali terjadi di kemudian hari,” pungkasnya. Melalui hearing tersebut, DPRD Kabupaten Sidoarjo berharap seluruh pihak segera mendiskusikan hasil rapat dengan langkah konkret, sehingga persoalan legalitas lahan, penerbitan sertifikat, serta penyediaan fasilitas umum bagi warga Kapling Balonggabus dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus hak-hak mereka sebagai konsumen dapat terpenuhi secara adil sesuai ketentuan yang berlaku. (Gus)

